

Jumat, 2 Maret 2012

Lapor ke BPK-RI

## LAKI Sambas Tanyakan Dana Aspirasi

Pontianak, BERKAT.

Dewan Pimpinan Cabang Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPC LAKI) Kabupaten Sambas, mempertanyakan dana aspirasi DPRD Kabupaten Sambas tahun 2011, termasuk proyek dari dana aspirasi tersebut.

Pasalnya, dana aspirasi puluhan milyar rupiah telah menyedot dana APBD Kabupaten Sambas tahun 2011. Yakni, besarnya sekitar Rp 63 Miliar. Sementara proyek aspirasi yang dikerjakan, realitanya tak sesuai dengan nilai anggaran proyek.

Bahkan, terindikasi banyak terjadi pemotongan kaitan dana aspirasi itu. Ditambah adanya pemotongan dari dinas-dinas yang mendapatkan titipan dari proyek aspirasi tersebut. Akibatnya, telah terjadi indikasi kerugian keuangan negara.

"Atas dasar inilah, kami melaporkan kasus indikasi kerugian negara berkaitan

dana aspirasi DPRD Kabupaten Sambas ke BPK-RI Kalbar di Pontianak," tegas Ketua DPC LAKI Kabupaten Sambas, Akhyani BA, kepada harian ini, kemarin.

Kedatangan Akhyani bersama beberapa pengurus LAKI Sambas didampingi Ketua Umum DPP LAKI, Burhanudin Abdullah. Mereka diterima Kepala Sub Auditor Kalbar I BPK-RI, Drs Hernold Ferry Makawimbing MSi didampingi beberapa staf dan auditor.

Bukan saja dana aspirasi dilaporkan ke BPK, LAKI Sambas juga memaparkan terjadinya defisit APBD Kabupaten Sambas tahun 2009 sebesar Rp 22,8 Miliar. Kemudian hasil koreksi APBD 2008, ada selisih belanja langsung dan tak langsung senilai Rp 6,5 Miliar.

"Defisit ini yang tidak disampaikan ke DPRD Sambas. Makanya kami berharap BPK segera menindaklanjuti terjadinya indikasi penyimpangan keuangan negara, termasuk indikasi penyimpangan dana

aspirasi," tegas Akhyani.

Mengenai dana aspirasi yang dinilai sarat KKN, menurut dia, juga sudah dilaporkan secara resmi ke Bupati Sambas. Tapi sampai saat ini, tak ada tanggapan serius dari kepala daerah tersebut.

"Kaitan kasus itu, kami sudah melaporkan ke Bupati Sambas, tapi tak ada jawaban," ujar Akhyani yang berjanji akan segera melaporkan kasus indikasi korupsi itu kepada penegak hukum.

Kaitan hal itu, Kepala Sub Auditor Kalbar I BPK-RI, Drs Hernold Ferry Makawimbing MSi, mengatakan, pihaknya tetap independen dalam melakukan audit keuangan negara di instansi pemerintah.

Bahkan, pihaknya tetap terbuka bagi siapa saja, yang melaporkan terjadinya indikasi kerugian negara atau telah terjadi indikasi korupsi. "Di Kalbar, dana aspirasi itu, memang telah terjadi banyak persoalan. Makanya kasus ini menjadi prioritas kami, dan tetap kami kejar," tegas

Hernold.

DPRD dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat, menurut dia, seharusnya dari bawah, saat pada pelaksanaan Mustenbang. Tapi anehnya, waktu ketok palu, dana aspirasi itu baru masuk. "Cara-cara seperti inilah yang sangat beresiko. Kendati sampai saat ini, belum ada temuan," ujar Hernold.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LAKI Burhanudin Abdullah, memberikan apresiasi kepada BPK-RI Kalbar yang telah menerima audiensi LAKI. Apalagi antara LAKI dengan BPK adalah mitra.

Namun berkaitan kasus korupsi, pihaknya tidak main-main. Makanya, bila ada temuan adanya indikasi kasus korupsi di instansi pemerintah, LAKI tetap melaporkan disertai data-data akurat ke pihak berwenang. "Ya, seperti kasus bansos KONI Kalbar," ujar Burhan sapaan akrabnya.

Dia juga mempertanyakan proyek kelautan dan perikanan. Apakah sudah di audit atau belum oleh BPK. Karena sasaran proyek ini adalah rakyat kecil. Juga audit perumahan rakyat yang dilaksanakan Menpera, lantaran nilainya cukup besar. (mzr)